



PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2013, maka perlu mengatur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Pasar Desa Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2003 tentang Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 01) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 09).
16. Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DP2KAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
12. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Pasar Desa adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan yang terdiri dari tanah, dan/atau bangunan - bangunan pasar, halaman serta fasilitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Desa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Pasar Desa adalah Retribusi Jasa umum yang dipungut dipasar desa.
15. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

BAB II

PEMBERIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan bagi hasil kepada Desa dari Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Pasar Desa Kabupaten Nganjuk kepada masing-masing Desa di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015 yang digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, Intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah serta peningkatan pelayanan masyarakat.

BAB III
SUMBER DAN BESARNYA DANA

Pasal 3

- (1) Sumber Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Pasar Desa Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015.
- (2) Besarnya Dana Bagi Hasil Bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014;
 - b. Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa, ke Desa sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi pasar desa Tahun 2014;
 - c. Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang dikembalikan ke Desa didasarkan pada jumlah penduduk Desa penerima dana.
 - d. Besaran Dana Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa yang dikembalikan ke Desa didasarkan pada realisasi penerimaan tahun 2014.

- (3) Rumus Pengembalian Pajak Daerah ke masing-masing Desa sebagai berikut :

$$\text{PENGEMBALIAN KE DESA} = \text{VARIABEL COST} + \text{FIXED COST}$$
$$\text{VARIABEL COST DESA} =$$

Penduduk Desa

$$\frac{\text{Penduduk Desa}}{\text{Total Penduduk Kab.}} \times (\text{Total Pengembalian} - \text{Total Fixed Cost Desa})$$

$$\text{FIXED COST DESA} = \text{Rp. 1.000.000,-}$$

- (4) Daftar Penerima Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Pasar Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGUNAAN DANA

Pasal 4

Penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi pasar desa yang diterima oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan untuk :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran pajak dan retribusi.

BAB V
PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 5

Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi pasar desa kepada Pemerintah Desa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 6

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Pasar Desa dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VI
PENCAIRAN DANA

Pasal 7

- (1) DP2KAD memproses permohonan pencairan dana bagi hasil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) DP2KAD mentransfer Dana Bagi hasil dari rekening kas umum daerah ke rekening Kas Desa.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setelah APBD Kabupaten diundangkan.
- (2) Kurang Salur/Lebih salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperhitungkan dengan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berikutnya.

- (3) Alokasi Dana Bagi hasil Pajak daerah dan retribusi daerah kurang/lebih Salur untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Pasar Desa kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 10

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Pasar Desa kepada Desa adalah Laporan Realisasi penerimaan dan realisasi belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Pasar Desa.

BAB VIII

MONITORING DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Monitoring

Pasal 11

Monitoring dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan sampai ketinggian Kabupaten sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 12

- (1) Camat melaksanakan pengawasan penggunaan Dana Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayahnya masing-masing.
- (2) Dalam hal terdapat penyimpangan yang bersifat administratif, Camat memberikan peringatan tertulis kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka penyimpangan dimaksud dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan.

- (4) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata terbukti melakukan penyimpangan administratif, maka berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat, Kepala Desa diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2014 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Pasar Desa Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 26 Oktober 2015

BUPATI NGANJUK,
ttd
TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 26 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Ttd.

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580810 198203 1 027

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

No.	Kecamatan Desa/Kelurahan	Besaran Pengembalian 2015			Keterangan
		Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Pasar Desa (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6
I	KEC. NGLUYU				
1	SUGIH WARAS	12,426,000	-	12,426,000	
2	NGLUYU	13,772,000	-	13,772,000	
3	TEMPURAN	12,145,000	-	12,145,000	
4	LENGKONGLOR	11,527,000	-	11,527,000	
5	GAMPENG	22,286,000	-	22,286,000	
6	BAJANG	6,374,000	-	6,374,000	
	JUMLAH	78,530,000	-	78,530,000	
II	KEC. REJOSO				
1	REJOSO	20,518,000	23,647,500.00	44,165,500	
2	NGADIBOYO	33,722,000		33,722,000	
3	MUSIR KIDUL	13,466,000		13,466,000	
4	BANJAREJO	9,940,000		9,940,000	
5	TALANG	13,823,000		13,823,000	
6	JATIREJO	11,336,000		11,336,000	
7	PUHKEREP	27,278,000		27,278,000	
8	MLORAH	36,143,000		36,143,000	
9	TALUN	10,453,000		10,453,000	
10	JINTEL	14,250,000		14,250,000	
11	KLAGEN	23,170,000		23,170,000	
12	KEDUNG PADANG	11,628,000		11,628,000	
13	NGANGKATAN	17,991,000		17,991,000	
14	MUSIR LOR	15,485,000		15,485,000	
15	WENGKAL	11,653,000		11,653,000	
16	SUKOREJO	14,405,000		14,405,000	
17	SIDOKARE	17,851,000		17,851,000	
18	MUNGKUNG	18,926,000		18,926,000	
19	GEMPOL	10,618,000		10,618,000	
20	SETREN	11,743,000		11,743,000	
21	SAMBIKEREK	20,417,000		20,417,000	
22	MOJOREMBUN	21,794,000		21,794,000	
23	TRITIK	7,258,000		7,258,000	
24	BENDOASRI	4,290,000		4,290,000	
	JUMLAH	398,158,000	23,647,500.00	421,805,500	
III	KEC. LENGKONG				
1	BANJARDOWO	14,908,000		14,908,000	
2	JATIPUNGGUR	12,467,000		12,467,000	
3	LENGKONG	15,229,000		15,229,000	
4	JEGREG	9,749,000		9,749,000	
5	KEDUNGMLATEN	14,149,000		14,149,000	
6	PRAYUNGAN	17,359,000		17,359,000	
7	BALONGASEM	5,666,000		5,666,000	
8	SAWAHAN	16,078,000		16,078,000	
9	NGRINGIN	20,257,000		20,257,000	

1	2	3	4	5	6
10	KETANDAN	22,060,000		22,060,000	
11	SUMBERKEPUH	9,965,000		9,965,000	
12	SUMBERSONO	8,815,000		8,815,000	
13	PINGGIR	4,732,000		4,732,000	
14	NGEPUNG	8,072,000		8,072,000	
15	BANGLE	11,532,000		11,532,000	
16	SUMBERMIRI	3,130,000		3,130,000	
	JUMLAH	194,168,000		194,168,000	
IV	KEC. JATIKALEN				
1	GONDANGWETAN	9,619,000		9,619,000	
2	PULE	10,744,000		10,744,000	
3	LUMPANG KUWIK	6,650,000		6,650,000	
4	MUNUNG	10,021,000		10,021,000	
5	DLULUREJO	4,968,000		4,968,000	
6	PERNING	14,772,000		14,772,000	
7	PULOWETAN	9,358,000		9,358,000	
8	NGASEM	8,142,000		8,142,000	
9	DAWUHAN	11,442,000		11,442,000	
10	BEGENDENG	12,497,000		12,497,000	
11	JATIKALEN	18,880,000		18,880,000	
	JUMLAH	117,093,000		117,093,000	
V	KEC. NGETOS				
1	KUNCIR	25,550,000	443,500.00	25,993,500	
2	KEPEL	29,865,000		29,865,000	
3	MOJODUWUR	24,918,000		24,918,000	
4	KWEDEN	10,282,000		10,282,000	
5	BLONGKO	27,660,000	3,617,000.00	31,277,000	
6	SURU	13,642,000		13,642,000	
7	ORO-ORO OMBO	9,835,000		9,835,000	
8	KLODAN	34,029,000		34,029,000	
9	NGETOS	38,087,000		38,087,000	
	JUMLAH	213,868,000	4,060,500.00	217,928,500	
VI	KEC. SAWAHAN				
1	NGLIMAN	20,377,000		20,377,000	
2	BENDOLO	8,182,000		8,182,000	
3	SIDOREJO	15,525,000		15,525,000	
4	SIWALAN	8,951,000		8,951,000	
5	KEBONAGUNG	27,991,000	1,058,500.00	29,049,500	
6	SAWAHAN	29,227,000	34,898,500.00	64,125,500	
7	BARENG	22,602,000		22,602,000	
8	DUREN	31,256,000		31,256,000	
9	MARGOPATUT	49,729,000	425,000.00	50,154,000	
	JUMLAH	213,840,000	36,382,000.00	250,222,000	
VII	KEC. BERBEK				
1	BERBEK	30,171,000		30,171,000	
2	BENDUNGREJO	13,833,000		13,833,000	
3	MLILIR	18,870,000		18,870,000	
4	KACANGAN	8,835,000		8,835,000	
5	SUMBERWINDU	15,807,000		15,807,000	
6	PATRANREJO	17,469,000		17,469,000	

1	2	3	4	5	6
7	NGRAWAN	15,837,000		15,837,000	
8	SENGKUT	11,864,000		11,864,000	
9	SEMARE	13,104,000		13,104,000	
10	SENDANGBUMEN	18,102,000		18,102,000	
11	TIRIPAN	16,068,000		16,068,000	
12	SUMBERURIP	23,275,000		23,275,000	
13	SALAMROJO	17,655,000		17,655,000	
14	MAGUAN	15,224,000		15,224,000	
15	CEPOKO	11,306,000		11,306,000	
16	BALONGREJO	17,394,000		17,394,000	
17	GROJOGAN	15,410,000		15,410,000	
18	BULU	18,323,000		18,323,000	
19	SONOPATIK	23,260,000		23,260,000	
	JUMLAH	321,807,000		321,807,000	
VIII	KEC. GONDANG				
1	LOSARI	6,274,000		6,274,000	
2	SENGGOWAR	19,327,000		19,327,000	
3	SUMBERAGUNG	13,823,000		13,823,000	
4	NGLINGGO	25,309,000		25,309,000	
5	KEDUNGLUGU	10,648,000		10,648,000	
6	KARANGSEMI	14,807,000	9,534,000.00	24,341,000	
7	BALONGGEBANG	39,845,000		39,845,000	
8	PANDEAN	14,365,000		14,365,000	
9	JA'AN	29,428,000		29,428,000	
10	NGUJUNG	14,019,000		14,019,000	
11	CAMPUR	32,100,000		32,100,000	
12	MOJOSETO	6,912,000		6,912,000	
13	SUMBEREJO	25,711,000		25,711,000	
14	KETAWANG	20,282,000		20,282,000	
15	SANGGRAHAN	20,211,000		20,211,000	
16	SENJAYAN	9,071,000		9,071,000	
17	GONDANG KULON	27,389,000		27,389,000	
	JUMLAH	329,521,000	9,534,000.00	339,055,000	
IX	KEC. SUKOMORO				
1	NGRENGKET	12,542,000	1,022,000.00	13,564,000	
2	PUTREN	26,223,000		26,223,000	
3	KEDUNGSOKO	9,574,000		9,574,000	
4	BUNGUR	22,110,000		22,110,000	
5	BLITARAN	10,824,000		10,824,000	
6	PEHSERUT	17,735,000		17,735,000	
7	NGLUNDO	14,476,000		14,476,000	
8	SUMENGKO	35,179,000		35,179,000	
9	NGRAMI	21,934,000		21,934,000	
10	BAGOR WETAN	20,553,000		20,553,000	
	JUMLAH	191,150,000	1,022,000.00	192,172,000	
X	KEC. WILANGAN				
1	NGADIPIRO	23,426,000	1,749,000.00	25,175,000	
2	WILANGAN	31,402,000		31,402,000	
3	MANCON	29,528,000		29,528,000	
4	NGUDIKAN	29,453,000		29,453,000	
5	SUKOHARJO	25,535,000		25,535,000	
6	SUDIMOROHARJO	41,668,000	3,718,000.00	45,386,000	
	JUMLAH	181,012,000	5,467,000.00	186,479,000	

1	2	3	4	5	6
XI	KEC. PACE				
1	SANAN	16,374,000		16,374,000	
2	PACEKULON	26,495,000		26,495,000	
3	BANARAN	13,727,000		13,727,000	
4	MLANDANGAN	20,588,000		20,588,000	
5	CERME	14,275,000		14,275,000	
6	GONDANG	15,535,000		15,535,000	
7	PACE WETAN	32,341,000		32,341,000	
8	JATIGREGES	20,899,000		20,899,000	
9	JOHO	41,588,000		41,588,000	
10	JETIS	16,103,000		16,103,000	
11	JAMPES	12,316,000		12,316,000	
12	PLOSOHARJO	20,749,000		20,749,000	
13	KECUBUNG	20,211,000	6,505,000.00	26,716,000	
14	BABADAN	15,264,000		15,264,000	
15	BODOR	12,542,000		12,542,000	
16	BATEMBAT	13,893,000		13,893,000	
17	GEMENGGENG	19,493,000		19,493,000	
18	KEPANJEN	22,431,000		22,431,000	
	JUMLAH	354,824,000	6,505,000.00	361,329,000	
XII	KEC. BAGOR				
1	GIRIREJO	17,253,000	1,038,000.00	18,291,000	
2	SEKARPUTIH	12,110,000		12,110,000	
3	BUDURAN	8,062,000		8,062,000	
4	BAGORKULON	18,951,000		18,951,000	
5	PETAK	10,980,000	25,530,000.00	36,510,000	
6	PARON	10,905,000		10,905,000	
7	KARANG TENGAH	12,225,000		12,225,000	
8	KEREP KIDUL	13,361,000		13,361,000	
9	KUTOREJO	10,056,000		10,056,000	
10	GUMENGGENG	13,260,000	5,686,000.00	18,946,000	
11	KENDALREJO	10,272,000		10,272,000	
12	NGUMPUL	24,687,000		24,687,000	
13	SELOREJO	24,074,000		24,074,000	
14	BALONGREJO	19,368,000		19,368,000	
15	SUGIHWARAS	17,258,000		17,258,000	
16	BANARANKULON	28,117,000		28,117,000	
17	BANARANWETAN	22,597,000		22,597,000	
18	PESUDUKUH	17,811,000		17,811,000	
19	GANDU	14,119,000		14,119,000	
	JUMLAH	305,466,000	32,254,000.00	337,720,000	
XIII	KEC. LOCERET				
1	TEMPEL WETAN	9,855,000		9,855,000	
2	MUNGKUNG	12,838,000		12,838,000	
3	TEKEN GLAGAHAN	14,129,000		14,129,000	
4	CANDIREJO	16,686,000		16,686,000	
5	SOMBRON	7,620,000		7,620,000	
6	GEJAGAN	15,053,000		15,053,000	
7	PUTUKREJO	13,813,000		13,813,000	
8	LOCERET	12,336,000		12,336,000	
9	KARANGSONO	14,496,000		14,496,000	
10	GODEAN	15,033,000		15,033,000	

1	2	3	4	5	6
11	NGLABAN	26,359,000		26,359,000	
12	GENJENG	17,017,000		17,017,000	
13	KENEP	13,612,000		13,612,000	
14	MACANAN	31,773,000		31,773,000	
15	NGEPEH	34,335,000		34,335,000	
16	TANJUNGREJO	17,032,000		17,032,000	
17	SEKARAN	15,154,000		15,154,000	
18	PATIHAN	15,053,000		15,053,000	
19	BAJULAN	26,721,000		26,721,000	
20	SUKOREJO	19,237,000		19,237,000	
21	KWAGEAN	21,281,000		21,281,000	
22	JATIREJO	11,316,000		11,316,000	
	JUMLAH	380,749,000		380,749,000	
XIV	KEC. PATIANROWO				
1	PATIANROWO	14,646,000		14,646,000	
2	LESTARI	9,312,000		9,312,000	
3	NGROMBOT	12,748,000		12,748,000	
4	TIRTOBINANGUN	26,083,000		26,083,000	
5	ROWOMARTO	25,887,000		25,887,000	
6	PECUK	21,306,000		21,306,000	
7	BABADAN	42,743,000		42,743,000	
8	PISANG	18,710,000		18,710,000	
9	NGEPUNG	45,154,000		45,154,000	
10	BUKUR	30,990,000		30,990,000	
11	PAKUNCEN	2,647,000		2,647,000	
	JUMLAH	250,226,000		250,226,000	
XV	KEC. NGANJUK				
1	KEDUNGDOWNO	20,684,000		20,684,000	
2	BALONGPACUL	10,267,000		10,267,000	
	JUMLAH	30,951,000		30,951,000	
XVI	KEC. PRAMBON				
1	GONDANGLEGI	37,479,000		37,479,000	
2	SINGKALANYAR	20,538,000		20,538,000	
3	TEGARON	16,460,000		16,460,000	
4	TANJUNGTANI	29,026,000		29,026,000	
5	SANGGRAHAN	11,181,000		11,181,000	
6	WATUDANDANG	32,788,000	14,514,500.00	47,302,500	
7	ROWOHARJO	16,083,000		16,083,000	
8	SUGIHWARAS	54,124,000		54,124,000	
9	SONOAGENG	41,367,000		41,367,000	
10	KURUNGREJO	25,279,000	7,191,000.00	32,470,000	
11	MOJOAGUNG	14,782,000		14,782,000	
12	BANDUNG	23,024,000		23,024,000	
13	NGLAWAK	9,378,000		9,378,000	
14	BALETURI	29,885,000	4,794,000.00	34,679,000	
	JUMLAH	361,394,000	26,499,500.00	387,893,500	

1	2	3	4	5	6
XVII	KEC. NGRONGGOT				
1	CENGGOK	62,431,000		62,431,000	
2	TANJUNGKALANG	61,246,000		61,246,000	
3	JUWET	31,578,000		31,578,000	
4	KELUTAN	27,012,000		27,012,000	
5	NGRONGGOT	59,925,000	30,565,500.00	90,490,500	
6	MOJOKENDIL	29,292,000		29,292,000	
7	BETET	26,695,500		26,695,500	
8	KALORAN	25,485,000		25,485,000	
9	BANJARSARI	29,583,500		29,583,500	
10	DADAPAN	26,389,000		26,389,000	
11	TRAYANG	20,698,500		20,698,500	
12	KALIANYAR	23,923,000		23,923,000	
13	KLURAHAN	51,894,000		51,894,000	
	JUMLAH	476,152,500	30,565,500.00	506,718,000	
XVIII	KEC. BARON				
1	KATERBAN	56,635,000	1,938,500.00	58,573,500	
2	KEMADUH	25,133,500		25,133,500	
3	SAMBIROTO	24,656,000		24,656,000	
4	MABUNG	31,105,000		31,105,000	
5	BARON	26,977,000	25,988,000.00	52,965,000	
6	KEMLOKOLEGI	23,908,000		23,908,000	
7	GEBANGKEREP	14,757,000		14,757,000	
8	JAMBI	18,348,000		18,348,000	
9	WAUNG	28,815,000		28,815,000	
10	GARU	18,855,000		18,855,000	
11	JEKEK	34,988,000	2,246,500.00	37,234,500	
	JUMLAH	304,177,500	30,173,000.00	334,350,500	
XIX	KEC. KERTOSONO				
1	BANGSRI	14,209,000		14,209,000	
2	KALIANYAR	12,014,500		12,014,500	
3	PANDANTOYO	20,156,000		20,156,000	
4	DRENGES	42,446,000		42,446,000	
5	JUWONO	11,854,000		11,854,000	
6	TANJUNG	22,496,500		22,496,500	
7	NGLAWAK	31,612,500		31,612,500	
8	KEPUH	16,595,000		16,595,000	
9	TEMBARAK	21,055,000		21,055,000	
10	PELEM	43,134,500		43,134,500	
11	KUTOREJO	15,314,000	7,509,000.00	22,823,000	
12	LAMBANGKUNING	19,206,500		19,206,500	
13	KUDU	23,481,000		23,481,000	
	JUMLAH	293,574,500	7,509,000.00	301,083,500	

1	2	3	4	5	6
XX	KEC. TANJUNGANOM				
1	KEDUNGOMBO	42,421,000	3,754,000.00	46,175,000	
2	GETAS	32,441,000		32,441,000	
3	JOGOMERTO	33,275,000		33,275,000	
4	MALANGSARI	15,480,000		15,480,000	
5	KEDUNGREJO	58,558,500	868,000.00	59,426,500	
6	DEMANGAN	38,061,500		38,061,500	
7	BANJARANYAR	44,269,500	1,443,500.00	45,713,000	
8	NGADIREJO	30,291,500		30,291,500	
9	SUMBERKEPUH	69,412,500		69,412,500	
10	SONOBEKEL	30,020,500		30,020,500	
11	WATES	16,670,000		16,670,000	
12	KAMPUNGBARU	61,959,000		61,959,000	
13	SIDOHARJO	56,575,000		56,575,000	
14	SAMBIREJO	32,988,500		32,988,500	
	JUMLAH	562,423,500	6,065,500.00	568,489,000	
	JUMLAH TOTAL	5,559,085,000	219,684,500.00	5,778,769,500.00	

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH. MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19661107 199403 1 005